Jurnal Governance and Politics (JGP)

VOLUME 5, NOMOR 2, TAHUN 2025

e-ISSN: 2776-3471

Pergeseran Legitimasi Sosio-Kultural dalam Politik Identitas Lokal: Studi Politik Genealogis Dan Elektoral Di Pilkades Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Yonas Engelbert Talok[1*], Basa Alim Tualeka[2], Frederick Fernandez[3],

[1]Program Studi Magister Ilmu Politik Fisip Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

[2]Program Studi Magister Ilmu Politik Fisip Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

[3]Program Studi Magister Ilmu Politik Fisip Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*e-mail korespondensi : talokengel@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk memahami dinamika politik identitas dan pergeseran legitimasi sosio-kultural dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) Tohe Leten tahun 2019. Secara khusus, studi ini menyoroti bagaimana pemilih desa mulai menggeser orientasi pilihan politik mereka dari dasar genealogis dan struktur adat (uma) menuju pertimbangan representasi fungsional, kedekatan sosial, serta program-program ekonomi yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Metode Kajian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan mengacu pada teori politik identitas dan hegemoni kultural (Gramsci), untuk menganalisis proses artikulasi identitas dan legitimasi kepemimpinan dalam konteks lokal. Hasil Kajian menunjukkan bahwa meskipun identitas genealogis tetap memiliki nilai simbolik dalam kampanye politik desa, legitimasi elektoral kini semakin ditentukan oleh kapasitas sosial kandidat untuk hadir dan memberi solusi konkret terhadap persoalan warga. Kemenangan Wilhelmus Bau, seorang kandidat dari suku minoritas Bunak dan bukan berasal dari uma dominan, mencerminkan pergeseran menuju legitimasi yang lebih inklusif dan berbasis kinerja. Transformasi ini juga dipengaruhi oleh akses teknologi komunikasi, mobilitas sosial perantau, serta meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya peran kepala desa dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, politik identitas lokal tidak lagi bersifat statis dan primordial, tetapi telah menjadi lebih strategis dan terbuka terhadap figur alternatif yang mampu membangun kepercayaan lintas komunitas.

Kata kunci: politik identitas, legitimasi, genealogis, Pilkades Tohe Leten 2019, hegemoni kultural,

Abstract

This thesis explores the dynamics of identity politics and the shifting socio-cultural legitimacy in the 2019 village head election (Pilkades) of Tohe Leten, located in Raihat Subdistrict, Belu Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia. The study focuses on how traditional genealogical-based leadership selection patterns have gradually shifted towards more functional and inclusive political preferences, driven by social proximity, economic programs, and performance-based legitimacy. Using a qualitative descriptive method, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The theoretical framework draws on identity politics and Gramscian cultural hegemony to analyze the articulation of power, identity, and legitimacy in the rural electoral context. The findings reveal that while genealogical identity (uma or clan affiliation) still holds symbolic weight in village campaigns, it is no longer the sole determinant of electoral success. The victory of Wilhelmus Bau, a candidate from the minority Bunak ethnic group with non-dominant genealogical ties, signifies

a major shift toward representational-functional legitimacy. This shift is further influenced by everyday socioeconomic challenges, mobile communication technology, and the evolving expectations of village constituents. Identity politics in Tohe Leten has thus transitioned from being rigidly primordial to becoming more strategic, adaptive, and performance-oriented, reflecting a deepening of democratic engagement at the village level.

Keywords: identity politics, legitimacy, genealogy, village election, cultural hegemony, rural leadership

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bagian dari proses demokratisasi di tingkat lokal yang memberi ruang bagi masyarakat desa untuk memilih pemimpin secara langsung. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa tidak hanya diberi kewenangan administratif yang lebih besar, tetapi juga ruang politik yang lebih luas untuk menentukan pemimpin secara langsung. Seiring dengan desentralisasi dan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (serta revisinya menjadi UU No. 3 Tahun 2024), kepala desa tidak hanya berperan sebagai tokoh administratif, tetapi juga sebagai figur politik, ekonomi, dan simbol sosial dalam komunitas lokal. Di dalam konteks tersebut, pertarungan dalam Pilkades sering kali melibatkan kompetisi identitas, bukan semata pertarungan gagasan atau program. Studi oleh Fachry Ali dan Bahtiar Effendy (2003) menunjukkan bahwa dalam masyarakat dengan struktur kekerabatan yang kuat, kontestasi politik lokal cenderung dibentuk oleh *primordial ties* seperti klan, suku, atau agama yang mempengaruhi preferensi elektoral. Di dalam konteks ini, Pilkades menjadi ajang kontestasi politik yang tidak jarang mencerminkan dinamika kekuasaan, loyalitas sosial, dan preferensi ideologis warga di tingkat akar rumput (Antlöv, 2005; Vel, Zakaria, & Bedner, 2017).

Salah satu fenomena penting yang muncul dalam Pilkades di berbagai daerah Indonesia adalah menguatnya politik identitas, terutama dalam bentuk pertarungan genealogis, etnisitas, afiliasi klan, serta simbol-simbol adat lokal yang masih hidup kuat dalam struktur masyarakat pedesaan. . Studi tentang Pilkades di berbagai daerah menunjukkan bahwa identitas suku, agama, dan hubungan genealogis sering kali menjadi dasar pembentukan dukungan politik warga. Di Toraja, misalnya, pemilihan kepala desa masih dipengaruhi oleh sistem tongkonan (rumah adat/klan), di mana hanya klan tertentu yang dapat mencalonkan pemimpin (Darmadi, 2020). Di wilayah Minangkabau, status dalam sistem kaum dan relasi adat juga menentukan siapa yang didukung dalam kontestasi lokal (Nusyirwan, 2018). Hal serupa ditemukan dalam Pilkades di Papua dan Kalimantan, di mana relasi etnis dan migrasi membentuk garis demarkasi sosial-politik dalam pemilihan (Sawitri, 2021; Telle, 2019). Sedangkan di dalam konteks desa-desa di kawasan timur Indonesia, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT), struktur sosial adat seperti suku, klan (uma), dan marga memainkan peran penting dalam mengorganisasi kehidupan sosial, termasuk dalam pembentukan dan legitimasi kekuasaan lokal (Vel & Bedner, 2015).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran pola pemilihan dari orientasi kultural-tradisional menuju orientasi yang lebih fungsional, representasional, dan bahkan transformatif. Pergeseran ini memperlihatkan bagaimana masyarakat desa semakin terbuka terhadap figur pemimpin yang tidak berasal dari klan dominan, tetapi memiliki legitimasi berbasis pengabdian, program kerja yang menyentuh kebutuhan, serta keterlibatan sosial aktif. Fenomena inilah yang menjadi fokus utama dalam Kajian tentang Pilkades Tohe Leten, sebuah desa di Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, NTT.

Berangkat dari itu, kajian ini melalui pendekatan hegemonik kultural dari Antonio Gramsci, yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya ditegakkan melalui dominasi, tetapi juga melalui persetujuan aktif dari masyarakat terhadap representasi baru yang dianggap lebih relevan. Kemenangan figur seperti Wilhelmus dapat dilihat sebagai bentuk dari "hegemoni alternatif", yakni kemampuan menciptakan blok historis baru yang menyatukan berbagai kelompok sosial dalam dukungan yang transformatif (Gramsci, 1971). Di dalam kerangka ini, identitas bukan entitas tetap, tetapi proses artikulasi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Stuart Hall (1996), bahwa identitas dibentuk dalam relasi sosial yang berubah-ubah, bukan warisan esensial.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) untuk memahami secara mendalam fenomena politik identitas dan polarisasi sosial dalam Pilkades Tohe Leten, Kabupaten Belu. Pendekatan kualitatif dipilih karena karakteristiknya yang mampu menangkap makna, pengalaman, dan dinamika sosial yang kompleks dalam konteks lokal, serta memungkinkan eksplorasi proses representasi identitas dan relasi kekuasaan secara kontekstual (Creswell, 2013).

Secara umum lokasi desa Tohe Leten merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah Desa Tohe Leten adalah 15,34 km². Persentase luas wilayahnya terhadap luas wilayah Kecamatan Raihat adalah 17,60%. Jarak dari Desa Tohe Leten ke ibu kota Kecamatan Raihat adalah 18 km. Sedangkan jarak dari Desa Tohe Leten ke ibu kota Kabupaten Belu adalah 36 km. Wilayah Desa Tohe Leten terbagi menjadi 4 rukun warga dan 8 rukun tetangga (Wikipedia, 2025)

Gambar Peta Desa Tohe Leten (Google Maps, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Identitas dan Kekerabatan Lokal Desa Tohe Leten

Politik identitas mengacu pada proses di mana identitas sosial seperti etnisitas, agama, adat, atau kekerabatan dijadikan alat untuk membentuk basis

dukungan politik. Identitas tidak sekadar bersifat kultural, melainkan juga dimobilisasi secara strategis dalam arena politik untuk mendapatkan legitimasi dan kekuasaan (Eriksen, 2010; Horowitz, 1985). Politik identitas merupakan strategi mobilisasi politik berbasis kategori identitas sosial seperti etnisitas, agama, adat, bahasa, hingga afiliasi kekerabatan. Stuart Hall (1996) sendiri memandang bahwa identitas sebagai konstruksi yang terus berubah dan menjadi medan kontestasi makna.

Menurut Antlöv (2003), sejak era reformasi dan diberlakukannya otonomi desa, pemilihan kepala desa menjadi lebih kompetitif dan terbuka, namun juga menimbulkan kecenderungan baru: mobilisasi dukungan berbasis afiliasi identitas lokal. Di dalam praktiknya, masyarakat cenderung memilih calon yang berasal dari kelompok sosial yang sama atau dekat secara relasional. Hal ini disebut Antlöv sebagai bentuk "*vote of belonging*", bukan "*vote of performance*".

Kajian yang ditulis oleh Benu, F. L. yang berjudul *Politik dan Budaya Lokal: Studi Tentang Konflik dan Integrasi dalam Proses Demokratisasi di Kabupaten Belu, NTT (2010)* menguraikan karakter demografis masyarakat Belu sebagian besar memiliki komposisi sosial dan budaya yang sangat khas, yang dibentuk oleh keragaman etnis lokal, warisan adat-istiadat, serta pengaruh kolonialisme dan misi Katolik sejak awal abad ke-20. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat yang tergolong dalam rumpun etnis Atoni Pah Meto (Dawan) dan beberapa subetnis Timor lainnya. Bahasa daerah utama adalah Uab Meto atau Dawan, yang menjadi identitas linguistik kuat bagi masyarakat setempat.

Struktur adat seperti Tohe Leten di Kabupaten Belu, identitas bukan sekadar atribut personal, melainkan bagian dari sistem sosial yang mengatur status, relasi, dan legitimasi kekuasaan. Meskipun mayoritas masyarakat Belu adalah pemeluk agama Katolik, praktik keagamaan mereka sering kali disertai unsur-unsur budaya lokal. Upacara misa syukur, perkawinan, dan kematian kerap dilaksanakan berdampingan dengan ritus adat. Ini menunjukkan adanya proses sinkretisme antara agama resmi dan nilai-nilai tradisional (Sri Martha, 2020).

Tabel Identitas Sosial Politik Uma di Desa Tohe Leten

No.	Nama Uma / Suku	Etnis	Status Sosial Adat	Basis Dukungan Sosial-Politik	Keterangan
1	Uma Metan Tohe	Tetun	Uma tertua / Leluhur pendiri kampung	Basis suara kuat di dusun pusat; pengaruh antar uma	Pengendali narasi asal-usul; sering mencalonkan figur kepala desa
2	Uma Alin Dasi	Tetun	Saudara tua Uma Metan	Koalisi tradisional dengan Uma Metan	Pemegang stabilitas adat; penyeimbang konflik intra-uma
3	Uma Manehat	Tetun	Klan muda / ekspansif	Didominasi generasi muda; kuat di pinggiran	Menantang dominasi klan tua dalam Pilkades; kampanye berbasis

No.	Nama Uma / Suku	Etnis	Status Sosial Adat	Basis Dukungan Sosial-Politik	Keterangan
					pembaruan
4	Uma Teskatar	Tetun	Pendatang lama; klan menengah	Dukungan situasional; mudah digerakkan	Tidak dominan, tapi signifikan sebagai basis suara koalisi
5	Uma Leon	Tetun	Aliansi antar klan kecil	Suara fleksibel, tergantung dinamika politik lokal	Sering jadi kingmaker dalam Pilkades kompetitif
6	Uma Manesa nulu Dato Mane	Tetun	Pengelola ritus adat (Sau Niki)	Loyalis adat; dipengaruhi restu leluhur	Memiliki otoritas spiritual tinggi; dapat menentukan moralitas kandidat
7	Komunitas Bunak	Bunak	Minoritas etnis; non-uma	Fragmentasi suara; diperebutkan oleh semua pihak	Tidak mencalonkan; tapi suara dapat jadi penentu dalam kontestasi ketat

Nilai-nilai adat di Tohe Leten, seperti prinsip penghormatan terhadap leluhur, posisi genealogis dalam struktur masyarakat, dan relasi tanah-warisan berperan penting dalam membentuk peta kekuasaan lokal. Adat menjadi sumber otoritas simbolik yang menentukan siapa yang dianggap "berhak" memimpin. Calon kepala desa yang berasal dari marga pemilik tanah (na'i udu) atau yang memiliki garis keturunan kepala suku sebelumnya sering kali dipandang lebih sah untuk mencalonkan diri. Tokoh adat dan sesepuh desa biasanya memberi "restu" politik hanya kepada calon yang dianggap sejalan dengan tatanan sosial-tradisional, karena kepemimpinan dilihat sebagai kelanjutan dari tanggung jawab adat, bukan sekadar jabatan administratif

Konstalasi Politik Identitas dalam Pikades Tohe Leten 2019

Kontestasi politik di desa Tohe Leten tidak bisa dilepaskan dari pengaruh struktur sosial berbasis klan (uma) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Sistem uma merupakan sistem sosial tradisional yang mengatur identitas, hak atas tanah, posisi sosial, hingga relasi kuasa antarindividu dalam komunitas. Dalam kerangka ini, setiap individu diidentifikasi melalui asal-usul genealogis, yang menentukan peran sosial, hak berbicara dalam forum adat, serta legitimasi untuk menduduki posisi kepemimpinan, termasuk sebagai kepala desa. Menurut Molon (2015), dalam masyarakat Belu, posisi kepala desa secara historis sering kali dianggap sebagai perpanjangan dari otoritas klan, sehingga kandidat yang memiliki afiliasi dengan uma dominan lebih berpeluang mendapatkan dukungan karena diasosiasikan dengan kontinuitas simbolik dan struktur kuasa adat.

Namun demikian, dinamika lokal menunjukkan bahwa struktur

tersebut kini mulai mengalami perubahan implikasi dengan nilai-nilai demokrasi modern, khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang memberikan otonomi lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, legitimasi klan masih tetap berpengaruh, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya sumber otoritas politik.

Di dalam masyarakat adat Tohe Leten, kekuasaan tradisional secara historis melekat pada struktur genealogis yang diwariskan melalui klan (*uma*), garis keturunan ayah, dan afiliasi etnis. Pemimpin adat atau kepala desa pada masa lalu dipilih berdasarkan siapa yang *"punya darah"* (memiliki garis keturunan sah), bukan semata-mata karena kemampuan memimpin. Namun dalam konteks Pilkades Tohe Leten 2019, terjadi pergeseran bentuk legitimasi politik: dari sistem berbasis darah dan klan menuju model kepemimpinan yang lebih inklusif dan terbuka terhadap figur di luar struktur genealogis dominan. In

Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tohe Leten tahun 2019 menjadi bukti konkret adanya pergeseran pola legitimasi politik di tingkat lokal, dari yang semula berbasis genealogis dan struktur adat (uma), menuju bentuk legitimasi yang lebih bersifat representatif-fungsional. Dari tiga calon yang bertarung dalam kontestasi tersebut, Wilhelmus Bau keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 183 suara sah, mengungguli dua pesaingnya: inkamben Yonas Engelbert Talok yang memperoleh 143 suara, dan kandidat ketiga Eustakeus yang hanya meraih 46 suara. Wilhelmus Bau adalah sosok yang secara genealogis berada di luar struktur dominan uma Tetun di Tohe Leten. Ia berasal dari etnis Bunak, yang secara historis dianggap sebagai kelompok minoritas di kawasan tersebut. Namun ia memenangkan pemilihan secara signifikan. Di dalam sistem adat Tohe Leten yang biasanya berputar dalam lingkaran klan Tetun (terutama klan seperti Uma Metan, Uma Teskatar, atau Uma Manehat), kemenangan Wilhelmus mencerminkan pergeseran struktur dominasi sosial dari basis kekerabatan genealogis ke arah dukungan sosial-lintas komunitas. Keterpilihannya bukan hanya anomali, tetapi menandai retakan hegemoni tradisional. Ia membangun dukungan dari kelompok-kelompok pinggiran, seperti masyarakat non-uma, warga pendatang, dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan monopoli politik klan adat.

Di dalam hal ini terbukti dalam Pilkades Tohe Leten 2019, di mana kandidat dari uma yang bukan dominan secara adat mampu meraih kemenangan dengan mengandalkan citra sosial, program kerja, dan dukungan lintas uma serta generasi muda. Perubahan ini mencerminkan terjadinya pergeseran hegemoni kultural dalam politik desa, di mana warga mulai mengembangkan logika politik yang lebih fungsional ketimbang semata-mata simbolik. Keputusan politik kini tidak hanya dilandasi oleh kedekatan genealogis, tetapi juga oleh pertimbangan rasional tentang manfaat langsung dari kepemimpinan yang ditawarkan, seperti akses ke bantuan sosial, program pembangunan, dan gaya kepemimpinan yang inklusif (Aspinall & Sukmajati, 2016). Selain itu, munculnya kelas muda terdidik, peningkatan mobilitas sosial, serta

penetrasi teknologi komunikasi turut mempercepat proses detribalisasi pilihan politik, di mana orientasi terhadap kepentingan pragmatis semakin menggeser dominasi norma adat.

Gambar Foto Suasana Penghitungan Suara Pilkades Tohe Leten Tahun 2019 (Sumber, Dinas Kominfo Belu, 2019)

Temuan ini memperkuat argumen bahwa legitimasi politik di Tohe Leten telah bergeser dari pola genealogis yang bersifat eksklusif ke arah basis legitimasi sosial yang lebih inklusif dan fungsional, sebagaimana dijelaskan oleh Carsten (2004) dan Fox (2006), bahwa kekerabatan tidak semata berbasis darah, tetapi juga dapat dibentuk melalui praktik sosial bersama dan solidaritas kolektif. Dalam kerangka hegemoni Gramscian, kemenangan Wilhelmus menunjukkan adanya konsensus sosial baru yang terbentuk dari artikulasi program konkret, empati sosial, dan partisipasi aktif dalam komunitas (Gramsci, 1971). Sebagaimana uraian teori hegemoni Antonio Gramsci (1971) menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan oleh dominasi struktural, tetapi juga melalui persetujuan aktif (*active consent*) dari masyarakat, yang diberikan kepada mereka yang mampu mewakili nilai dan harapan bersama. Di dalam konteks Tohe Leten, dominasi klan sebagai bentuk kekuasaan tradisional telah digeser secara damai dan simbolik oleh figur yang mendapatkan kepercayaan melalui kerja sosial dan janji politik yang inklusif. Persetujuan warga terhadap kandidat seperti Wilhelmus Bau menjadi bentuk hegemoni baru yang tidak berbasis dominasi, tetapi berbasis representasi aktif. Ini membuktikan bahwa masyarakat desa tidak pasif secara politik, melainkan melakukan artikulasi ulang terhadap nilai-nilai identitas dan kepemimpinan sesuai kebutuhan zaman.

Lebih jauh, dinamika ini juga bisa dibaca melalui lensa teori identitas dari Stuart Hall (1996), yang menolak gagasan identitas sebagai sesuatu yang esensial dan tetap. Hall menekankan bahwa identitas adalah proses representasi, yang dibentuk dalam ruang diskursif yang selalu berubah dan bergantung pada konteks historis serta posisi sosial. Identitas politik warga Tohe Leten tidak lagi bersifat statis dan primordial, tetapi mengalami proses konstruksi ulang berdasarkan pengalaman hidup, akses informasi, dan interaksi lintas uma maupun generasi. Dengan demikian, Pilkades 2019 memperlihatkan bagaimana identitas sosial-politik di desa dapat bersifat cair, kontekstual, dan dinamis. Warga tidak lagi memilih hanya berdasarkan garis darah, tetapi berdasarkan persepsi terhadap siapa yang paling mampu mengartikulasikan aspirasi kolektif mereka. Ini merupakan bentuk dari pendalaman demokrasi lokal, di mana rakyat menjadi aktor aktif dalam menentukan arah perubahan sosial, bukan hanya penerima warisan budaya politik masa lalu.

Selain itu, perubahan pola pikir warga sangat dipengaruhi oleh pengalaman keseharian dalam menghadapi problem ekonomi, akses terhadap layanan sosial, dan realitas pemerintahan desa. Janji pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Wilhelmus serta narasi

keberpihakan kepada masyarakat miskin menjadi daya tarik elektoral yang besar. Warga tidak hanya mencari pemimpin yang dekat secara budaya, tetapi juga yang dianggap mampu memperjuangkan kebutuhan nyata mereka.Faktor seperti bantuan sosial tunai, program desa, serta kemampuan komunikasi antar-kelompok menjadi aspek penting dalam redefinisi kepemimpinan desa.

Penetrasi teknologi komunikasi seperti *HP, WhatsApp*, dan mobilitas sosial perantau turut mendorong terbentuknya jaringan informasi baru yang lebih cepat, terbuka, dan tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh elite adat atau aparat desa. Komunikasi politik tidak lagi berlangsung eksklusif dalam ruang adat, tetapi dalam ruang digital dan perbincangan horizontal. Dengan demikian, terjadi re-artikulasi hegemoni, sebagaimana dirumuskan Gramsci, bahwa kekuasaan baru tidak hanya didapat lewat dominasi, tetapi juga lewat persetujuan aktif masyarakat terhadap figur alternatif yang dianggap lebih relevan dan akomodatif terhadap kondisi sosial kontemporer. Dalam konteks ini, identitas politik berubah dari yang bersifat primordial menjadi lebih strategis.

PENUTUP

Simpulan

Hasil Pilkades 2019 di Desa Tohe Leten memberikan gambaran nyata bahwa masyarakat desa tengah mengalami transisi sosial-politik yang signifikan. Struktur adat dan genealogis, yang selama ini menjadi fondasi utama dalam penentuan kepemimpinan lokal, masih eksis dalam kesadaran kolektif, tetapi telah mengalami proses negosiasi ulang oleh kekuatan sosial baru yang bersumber dari pengalaman hidup bersama, kebutuhan ekonomi, serta rasionalitas politik warga. Fenomena ini mencerminkan rekonstruksi legitimasi kekuasaan, dari yang berbasis pada warisan genealogis (*hereditary legitimacy*) menuju bentuk legitimasi yang lebih representatif dan sosial fungsional. Warga tidak lagi secara otomatis memihak calon dari klan dominan, melainkan mempertimbangkan keterlibatan sosial, empati, serta kemampuan menyuarakan kebutuhan konkret masyarakat.

Temuan utama menunjukkan bahwa politik identitas di Tohe Leten bersifat dinamis, tidak lagi semata-mata ditentukan oleh garis keturunan atau keanggotaan dalam struktur adat (uma). Meski genealogis masih menjadi acuan identitas dasar, praktik politik dalam Pilkades 2019 memperlihatkan bahwa faktor program kerja, kedekatan sosial, dan representasi kepemimpinan inklusif memiliki peran signifikan dalam pembentukan pilihan politik. Kemenangan Wilhelmus Bau, seorang kandidat dengan afiliasi suku minoritas Bunak dan genealogis yang tidak dominan secara adat, menjadi bukti adanya pergeseran dari legitimasi berbasis darah ke legitimasi representatif-fungsional. Dukungan terhadapnya dibentuk melalui kerja sosial, citra inklusif, serta janji-janji ekonomi langsung yang membentuk koalisi baru lintas uma dan lintas generasi.

Saran

Kajian ini membuka peluang untuk studi lanjutan mengenai relasi antara identitas, bantuan sosial, dan reproduksi kekuasaan di tingkat desa. Akan sangat penting untuk menganalisis apakah demokratisasi yang sedang terjadi bersifat substansial atau hanya reproduksi dari struktur patron-klien lama dalam wujud baru. Penelitian lebih lanjut juga perlu mengamati dinamika pasca-kemenangan: apakah pemerintahan baru

berhasil menciptakan pemerataan, atau justru memperkuat segmentasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's troubling elections: Indonesia's polarized democracy. *Journal of Democracy, 30*(4), 104–118. https://doi.org/10.1353/jod.2019.0077

Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. (2021). *Kabupaten Belu Dalam Angka 2021*. Atambua: BPS Kabupaten Belu.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. (2022). *Kecamatan Raihat Dalam Angka 2022*. Atambua: BPS Kabupaten Belu.

Carsten, J. (2004). *After Kinship*. Cambridge: Cambridge University Press.

Chandra, K. (2006). What is ethnic identity and does it matter? *Annual Review of Political Science, 9*, 397–424. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.062404.170715

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

DiMaggio, P., Evans, J., & Bryson, B. (1996). Have Americans' social attitudes become more polarized? *American Journal of Sociology, 102*(3), 690–755. https://doi.org/10.1086/230995

Eriksen, T. H. (2010). *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives*. Pluto Press.

Horowitz, D. L. (1985). *Ethnic Groups in Conflict*. University of California Press.

Fealy (Eds.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation* (pp. 187–204). Institute of Southeast Asian Studies.

Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*. New York: Pantheon.

Fox, J. J. (2006). *Comparing local cultures in East Indonesia: The use of the house societies approach*. In J. J. Fox (Ed.), *Inside Austronesian Houses: Perspectives on Domestic Designs for Living* (pp. 1–28). ANU Press.

Fox, J. J. (2006). *Inside Austronesian Houses: Perspectives on Domestic Designs for Living*. Canberra: ANU Press.

Kemendesa PDTT. (2023). *Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2022–2023*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Prokopim Kabupaten Belu. (2024, Mei 11). *Kades Tohe Leten Sampaikan Potensi Desa di Hadapan Bupati Belu*. Retrieved from https://prokopim.belukab.go.id

Geertz, C. (1961). *The religion of Java*. Free Press.

Hall, S. (1990). Cultural identity and diaspora. In J. Rutherford (Ed.), *Identity: Community, culture, difference* (pp. 222–237). Lawrence & Wishart.

Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.

Henley, D. (2012). *The genealogical charter in Southeast Asia*. In R. Michael Feener & T. Sevea (Eds.), *Islamic connections: Muslim societies in South and Southeast Asia* (pp. 89–106). ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Iyengar, S., Sood, G., & Lelkes, Y. (2012). Affect, not ideology: A social identity perspective on polarization. *Public Opinion Quarterly, 76*(3), 405–431. https://doi.org/10.1093/poq/nfs038

Kuper, A. (1999). *Culture: The anthropologists' account*. Harvard University Press.

Kombi.id. (2024). *Sedikit Mengenal Sastra Lisan Suku Tetun yang Masih Eksis Hingga Saat Ini.*

Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics*. Verso.

Molnar, A. K. (2010). *Timor Leste: Politics, History, and Culture*. Routledge.

Therik, G. (2004). *Wehali: The Female Land: Traditions of a Timorese Ritual Centre*. Pandanus Books.

Molon, R. A. (2015). Sistem kekerabatan dan struktur sosial masyarakat Belu. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 17(1), 87–

Mietzner, M. (2018). Fighting illiberalism with illiberalism: Islamist populism and democratic deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs, 91*(2), 261–282. https://doi.org/10.5509/2018912261

Nandy, A. (1983). *The intimate enemy: Loss and recovery of self under colonialism*. Oxford University Press.

Pratikno. (2005). Political decentralization in Indonesia: A new agenda for local politics? In E. Aspinall & G. Fealy (Eds.), *Local power and politics in Indonesia: Decentralisation and democratisation* (pp. 69–85). ANU Press.

Purwaningsih, E. (2021). Polarisasi politik dalam pemilihan kepala desa: Studi kasus di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24*(1), 45–60. https://doi.org/10.22146/jsp.62438

Scott, J. C. (1972). *Patron-client politics and political change in Southeast Asia*. The American Political Science Review, 66(1), 91–113. https://doi.org/10.2307/1959280

Sumarto, M. (2011). Polarisasi politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 14*(2), 123–135. https://doi.org/10.22146/jsp.10943

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The Social Psychology of Intergroup Relations* (pp. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole.

Taylor, C. (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Vel, J., Zakaria, Y., & Bedner, A. (2017). Law-making as a strategy for change: Indonesia's new village law. *Asia Pacific Journal of Anthropology, 18*(1), 15–31. https://doi.org/10.1080/14442213.2016.1267943

Vel, J. A. C. (2008). Desa Membangun: Dynamics of Rural Politics in Indonesia. In J. Schiller & B. Martin-Schiller (Eds.), *Local Power and*

Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation (pp. 151–175). ISEAS.

Winarno, B., & Cahyono, H. (2020). Polarisasi politik dan dampaknya terhadap pembangunan desa pasca pilkades. *Jurnal Politik Profetik, 8*(2), 112–128. https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2.14635

Ekaputra, Y. (2020). Politik identitas dan kontestasi ruang perbatasan: Studi di Kabupaten Belu, NTT. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 21–36.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.

Hall, S. (1996). Who needs 'identity'? In S. Hall & P. du Gay (Eds.), *Questions of Cultural Identity* (pp. 1–17). London: SAGE Publications.

Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.

Molon, R. A. (2015). Sistem kekerabatan dan struktur sosial masyarakat Belu. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 17(1), 87–103.

Putra, Y. A., & Arifianto, A. R. (2021). Politik identitas dalam pemilihan kepala desa di Indonesia Timur: Antara afiliasi genealogis dan strategi elektoral. *Jurnal Politik Lokal*, 3(2), 89–107.

Rani, M. A., & Setiawan, I. (2020). Representasi identitas dan kekuasaan dalam kontestasi Pilkades: Studi kasus di NTT. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 61–80.

Vel, J., & Bedner, A. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493–507.

Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham, NC: Duke University Press.

Rani, M. A., & Setiawan, I. (2020). Representasi identitas dan kekuasaan dalam kontestasi Pilkades: Studi kasus di NTT. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 61–80.

Scott, J. C. (1972). *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*. American Political Science Review, 66(1), 91–113.

Young, I. M. (1990). *Justice and the Politics of Difference*. Princeton University Press.

Dinas PMD Kabupaten Belu. (2020). *Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Kabupaten Belu*. Atambua: Pemerintah Kabupaten Belu.

Peraturan Bupati Belu No. 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Kabupaten Belu.